Samuka Vol 6 No2, September 2022 : Hal 112-121

**SAMUKA**

**Jurnal Samudra Ekonomika**

https://ejurmalunsam.id/index.php/jse

**Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Aceh**

**Nurlina, Ilham Fajar**

nurlina@unsam.ac.id

ilhamfajarrq@gmail.com

Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Received: Juli 2022 ; Accepted: September 2022 ; Published: September 2022

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah baik secara parsial dan simultan dan (2) untuk mengetahui apakah telah terjadi *flypaper effect* di Aceh pada tahun 2005-2020. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Aceh yang di peroleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda menggunakan perangkat Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Aceh. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Aceh. Secara simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect,* sesuai dengan syarat bahwa nilai koefisien Dana Alokasi Umum lebih kecil dari pada Pendapatan Asli Daerah di Aceh.

Kata kunci : *Flypaper Effect,* Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah

***Abstrak***

*The purpose of this research is (1) to find out whether the General Allocation Fund and Regional Original Revenue have a significant effect on Regional Expenditures both partially and simultaneously and (2) to find out whether there has been a flypaper effect in Aceh in 2005-2019. The data used is in the form of secondary data, namely the Realization Report of the Aceh Government's Regional Revenue and Expenditure Budget which was obtained from the Directorate General of Fiscal Balance. The analytical method used in this study is multiple linear regression using the Eviews device. The results showed that partially, the General Allocation Fund had a negative and insignificant effect on Regional Expenditures in Aceh. Meanwhile, Regional Original Income has a positive and significant impact on Regional Expenditures in Aceh. Simultaneously the General Allocation Fund and Regional Original Revenue have a positive and significant effect on Regional Expenditures in Aceh. This shows that there is no flypaper effect, in accordance with the condition that the coefficient value of the General Allocation Fund is smaller than the Regional Original Income in Aceh.*

*Keywords: Flypaper Effect, General Allocation Fund, Regional Original Income, Regional Expenditure*

**PENDAHULUAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan desentralisasi seperti sekarang ini, pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian melalui kebijakan-kebijakan dalam mengalokasikan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan yang menunjukkan besarnya biaya yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan yang akan dikerjakan. Dalam konteks Negara berkembang, Hidayat (2005) mengungkapkan bahwa ada tiga alasan utama mengapa sebagian besar Negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan densetralisasi fiskal, yaitu; untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik.

Sejalan dengan Hirawan (2007) yang menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka diharapkan tujuan pembangunan ekonomi yang sasaran akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menjalankan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran diperlukan akibat terjadinya masalah minimnya sumber. Anggaran idealnya harusnya berbalik, dimana belanja langsung bisa lebih besar. Kondisi anggaran yang tidak ideal dapat membuat pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal dalam anggaran belanja daerah pemerintah daerah juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Salah satu bentuk anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah melalui dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan untuk setiap daerah. Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jelas terlihat perubahan mendasar pada sistem pengelolaan pemerintahan daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. dana perimbangan tersebut terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK).

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisiensi dalam rangka pembiayaan kegiatan desentralisasi, dengan mengedepankan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran penganggaran kegiatan dekonsentrasi dan tugas pendanaan.

Penthury (2011), menjelaskan dalam menjalankan sistem desentralisasi fiskal harus dapat memaksimalkan kebutuhan untuk masyarakat, pemerintah daerah harus mengedepankan dan sanggup memberikan kebutuhan layanan publik secara optimal kepada seluruh masyarakat di daerah tersebut, yang dapat memberikan dampak kepuasan terhadap masyarakat dalam menikmati layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat telah memberikan potensi yang ada pada diri mereka untuk daerah yang berupa pembayaran pajak-pajak yang dapat memberikan peningkatan penerimaan daerah.

Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pembiayaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah langsung tanpa ikut campur tangan dari pemerintah pusat dalam menjalankan sistem otonomi daerah. Kenyataan yang sering terjadi bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan perekonomian di daerah otonomi, sehingga kemandirian daerah otonom dalam membiayai kegiatannya masih sangat kurang karna belum dapat memaksimalkan potensi yang ada pada daerah tersebut sehingga pemerintah pusat akan terus memberikan pendanaan dalam jumlah besar kepada daerah otonomi. Sehingga keterlibatan daerah otonomi dalam mengasah kekayaan daerah tidak berjaan secara efektif.

Berikut ini merupakan pengamatan awal pada dana alokasi umum (DAU), pemerintah Aceh selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2015-2020 diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel I-1**

**Perkembangan Dana Alokasi Umum di Aceh**

**Tahun 2015-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Dana Alokasi Umum****(Rupiah)** | **Perkembangan (%)** |
| 2015 | 1.237.894.986.000 | - |
| 2016 | 1.263.870.989.000 | 2,09 |
| 2017 | 2.060.263.235.000 | 63,0 |
| 2018 | 2.060.263.235.000 | 0 |
| 2019 | 2.322.266.506.000 | 12,7 |
| 2020 | 1.956.492.796.000 | -15,7 |

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data Keuangan Daerah 2015-2020*

Dari Tabel I-1 dapat dilihat bahwa dana alokasi umum pemerintah Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, dana alokasi umum pemerintah Aceh yaitu Rp. 1.237.894.986.000. Dana alokasi umum pemerintah Aceh pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.263.870.989.000 dengan perkembangan sebesar 2,09%. Dan ditahun 2017 dana alokasi umum pemerintah Aceh juga terus meningkat menjadi Rp. 2.060.263.235.000 dengan perkembangan meningkat menjadi 63,0%. Pada tahun 2018, dana alokasi umum pemerintah Aceh tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan yaitu Rp. 2.060.263.235.000 dengan perkembangan menjadi 0%. Dan di tahun 2019 dana alokasi umum pemerintah Aceh mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.322.266.506.000 dan perkembangan juga meningkat menjadi 12,7%. Dana alokasi umum pemerintah Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu disebabkan tidak tercukupinya belanja daerah jika hanya menggunakan pendapatan yang bersumber dari daerah saja, sehingga adanya transfer dana dari pemerintah pusat yang dapat membantu pemerintah Aceh dalam memenuhi belanja daerahnya. Akan tetapi penerimaan dana alokasi umum pemerintah Aceh pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.956.492.796.000 dengan perkembangan menjadi -15,7%. Hal ini disebabkan sumber penerimaan dana alokasi umum nasional yaitu berupa penerimaan pajak nasional turun sehingga berdampak terhadap penerimaan dana alokasi umum pemerintah Aceh.

Pemerintah daerah diharapkan agar mampu dalam mengelola penerimaan daerahnya sendiri yang bertujuan untuk membangun perekonomian daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pemasukan daerah yang dapat dikelola dari sumber daya yang tersedia yang bukan termasuk dana yang bersumber dari pemerintah maupun penerimaan lainnya. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pemerintah daerah mengalokasikan pendapatan asli daerah yang ditujukan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk tetap yakni peralatan, pembangunan, insfrastruktur, dan aset lainnya. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah yang akan menciptakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari, 2012).

Berikut ini merupakan pengamatan awal pada pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah Aceh selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2015-2020 diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel I-2**

**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Aceh**

**Tahun 2015-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan Asli Daerah****(Rupiah)** | **Perkembangan (%)** |
| 2015 | 1.972.049.032.902 | - |
| 2016 | 2.031.995.444.907 | 3,03 |
| 2017 | 2.276.305.568.814 | 12,0 |
| 2018 | 2.359.385.393.646 | 3,64 |
| 2019 | 2.698.912.471.144 | 14,3 |
| 2020 | 2.570.775.877.183 | -4,74 |

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data Keuangan Daerah 2015-2020*

Dari Tabel I-2 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 pendapatan asli daerah pemerintah Aceh mencapai Rp. 1.972.049.032.902. Pada tahun 2016, pendapatan asli daerah pemerintah Aceh meningkat menjadi Rp. 2.031.995.444.907 dengan perkembangan sebesar 3,03%. Pada tahun 2017, anggaran pendapatan asli daerah pemerintah Aceh mencapai Rp. 2.276.305.568.814 dengan perkembangan juga meningkat menjadi 12,0%. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah pemerintah Aceh yaitu Rp. 2.359.385.393.646 dengan perkembangan yaitu sebesar 3,64%. Dan di tahun 2019 penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Aceh menjadi Rp. 2.698.912.471.144 dengan perkembangan pendapatan asli daerah pemerintah Aceh meningkat sebesar 14,3%. Dengan penerimaan dana yang diterima oleh pemerintah Aceh, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dilaksanakan secara optimal dan efisien sehingga pendapatan asli daerah pemerintah Aceh terus meningkat. Namun pada tahun 2020 pendapatan asli daerah pemerintah Aceh mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 2.570.775.877.183 dengan perkembangan pendapatan asli daerah pemerintah Aceh menjadi -4,74%. Hal ini disebabkan penerimaan dana yang diterima oleh pemerintah Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan.

Pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut Priyo (2009), belanja daerah awalnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan salah satu variabel terikat yang besarannya pasti bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, yaitu dari penerimaan daerah sendiri maupun dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Fenomena yang sering terjadi dalam kegiatan otonomi, bahwa transfer yang bersumber dari pemerintah pusat khususnya berupa dana alokasi umum begitu besar dalam membiayai belanja daerah, dan kurang berdampak bagi PAD daerah yang dapat dikatakan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Berikut ini merupakan pengamatan awal pada belanja daerah, pemerintah Aceh selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2015-2020 diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel I-3**

**Perkembangan Belanja Daerah di Aceh**

**Tahun 2015-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Belanja Daerah****(Rupiah)** | **Perkembangan (%)** |
| 2015 | 12.135.635.484.501 | - |
| 2016 | 12.119.713.196.647 | -0,13 |
| 2017 | 13.832.848.610.133 | 14,1 |
| 2018 | 12.306.306.187.481 | -11,0 |
| 2019 | 15.787.883.385.490 | 28,2 |
| 2020 | 13.242.212.801.894 | -16,1 |

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data Keuangan Daerah 2015-2020*

Dari Tabel I-3 dapat dilihat bahwa belanja daerah pemerintah Aceh mengalami fluktuasi, dimana peningkatan dan penurunannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2015, jumlah biaya yang di keluarkan pemerintah Aceh untuk belanja daerah yaitu sebesar Rp. 12.135.635.484.501. Namun pada tahun 2016 belanja daerah pemerintah Aceh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 12.119.713.196.647 dengan perkembangan yaitu sebesar -0,13%. Pada tahun 2017 pembiayaan belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah Aceh mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 13.832.848.610.133 dan perkembangannya juga mengalami peningkatan sebesar 14,1%. Akan tetapi pada tahun 2018 belanja daerah pemerintah Aceh mengalami penurunan kembali yaitu menjadi Rp.12.306.306.187.481 dengan perkembangan yang mengalami penurunan menjadi -11,0%. Dan pada tahun 2019 pembiayaan belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.15.787.883.385.490 dengan perkembangan yang juga mengalami peningkatan sebesar 28,2%. Belanja daerah mengalami peningkatan karena sudah banyaknya dana yang dialokasikan oleh pemerintah Aceh yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan aset atau kekayaan daerah. Dan ditahun 2020 pembiayaan belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh mengalami penurunan kembali menjadi Rp.13.242.212.801.894 dengan perkembangan yang juga mengalami penurunan sebesar -16,1%. Penyebab terjadinya fluktuasi dikarenakan masih sedikitnya belanja yang dialokasikan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintah Aceh

Dapat dilihat bahwa dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi*.* Salah satu dana perimbangan dari pemerintah berupa dana alokasi umum yang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan daerah sehingga tidak hanya menggunakan pendapatan yang didapat di daerah saja karna jika hanya mengandalkan potensi yang ada di daerah yaitu pendapatan asli daerah akan sulit terlaksana kegiatan yang akan dilakukan mengingat dana yang didapat pemerintah Aceh masih sedikit. Oleh karena itu dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan pendapatan asli daerah yang didapat untuk membiayai belanja daerah di daerahnya. Berdasarkan latar belakang, penulis tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul

“*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Aceh”.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data berdasarkan sifatnya adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka. Berdasarkan cara memperolehnya adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di pemerintah Aceh, yaitu data dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja daerah dari tahun 2005-2020, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data Keuangan Daerah.

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Aceh pada tahun 2005-2020 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data Keuangan Daerah.
2. Kepustakaan (*survei literatur*) adalah identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis (Kuncoro, 2009). Kepustakaan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

**Metode Analisis Data**

Salah satu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Persamaan estimasi regresi linier berganda yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2014).

**Y = α + β1X1+β2X2+e**

Dimana:

Y = Belanja Daerah

α = Konstanta

β1-β2 = Koefisien Regresi

X1 = Dana Alokasi Umum

X2 = Pendapatan Asli Daerah

e= Error

Untuk menguji fenomena *flypaper effect* akan dilakukan serangkaian pengujian setelah tahap pengujian pengaruh variabel, tahap-tahap tersebut antara lain, tahap pertama membandingkan nilai koefisien pendapatan asli daerah dengan nilai koefisien dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Untuk melihat apakah terjadi *flypaper effect* atau tidak dapat dilihat dari perbandingan antara koefisien dana alokasi umum dan koefisien pendapatan asli daerah, atau dapat difungsikan jika

β1 > β2 berarti $\frac{β1}{β2}$ > 1 maka terjadi *flypaper effect* (Tresch, 2002)

Dimana :

β1 = Koefisien Dana Alokasi Umum

β2 = Koefisien Pendapatan Asli Daerah

**HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam menganalisis data, dengan menggunakan program Eviews. Adapun hasil pengolahan data serta analisisnya sebagai berikut:

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi merupakan salah satu pengujian hipotesis untuk mengetahui besarnya pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Aceh dapat dilihat dari hasil regresi linear berganda berupa uji parsial (Uji t), uji simultan (Uji F), dan koefisien determinan (R2). Adapun hasil pengolahan data dengan analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

**Tabel IV-4**

**Hasil Perhitungan Dengan Eviews**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dependent Variable: Y |  |  |
| Method: Least Squares |  |  |
| Date: 11/18/21 Time: 21:51 |  |  |
| Sample: 2005 2020 |  |  |
| Included observations: 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | 2.31E+12 | 8.83E+11 | 2.610510 | 0.0216 |
| X1 | -0.298861 | 2.593502 | -0.115235 | 0.9100 |
| X2 | 5.153113 | 2.089045 | 2.466731 | 0.0283 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| R-squared | 0.860981 |     Mean dependent var | 9.14E+12 |
| Adjusted R-squared | 0.839593 |     S.D. dependent var | 4.39E+12 |
| S.E. of regression | 1.76E+12 |     Akaike info criterion | 59.39362 |
| Sum squared resid | 4.01E+25 |     Schwarz criterion | 59.53849 |
| Log likelihood | -472.1490 |     Hannan-Quinn criter. | 59.40104 |
| F-statistic | 40.25618 |     Durbin-Watson stat | 0.748621 |
| Prob(F-statistic) | 0.000003 |  |  |  |

*Sumber : data diolah, 2021*

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

LogY**=** 2,31E+12 + -0,298861 + 5,153113

1. Nilai konstanta sebesar 2,31E+12 artinya apabila nilai dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan, maka belanja daerah pemerintah Aceh sebesar 2,31E+12 satuan.
2. Nilai koefisien dana alokasi umum (X1) sebesar -0,298861 artinya dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap belanja daerah, yaitu apabila dana alokasi umum menurun 1 satuan maka belanja daerah akan menurun sebesar -0,298861 satuan.
3. Nilai koefisien pendapatan asli daerah (X2) sebesar 5,153113 artinya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah, yaitu apabila pendapatan asli daerah meningkat 1 satuan maka belanja daerah meningkat sebesar 5,153113 satuan.

**Pembuktian Hipotesis**Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Hasil Uji t

Uji t dilakukan untuk membuktikan secara parsial apakah terdapat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel IV-4 dapat dilihat bahwa:

1. Variabel dana alokasi umum memiliki thitung sebesar -0,115235 dengan t sig sebesar 0,9100. Karena nilai t sig 0,9100 > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Aceh sehingga hipotesis pertama ditolak.
2. Variabel pendapatan asli daerah memiliki thitung sebesar 2,466731 dengan t sig sebesar 0,0283. Karena nilai t sig 0,0283 < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Aceh sehingga hipotesis kedua diterima atau terbukti kebenarannya.

2) Hasil Uji F

Uji F untuk menguji signifikansi sejauh mana variabel-variabel independen secara simultan yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel IV-4 dapat diketahui nilai probabilitas sebesar 0,000003 karena nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yakni 0,05 (0,000003 < 0,05) maka pengaruh simultan dari variabel bebas dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Aceh adalah signifikan.

**Hasil Analisis Koefisien Determinan (R2)**

 Berdasarkan tabel IV-4 diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,8609. Besarnya angka koefisien determinasi (R square) adalah 0,8609 atau sama dengan 86,09%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel dana alokasi umum (X1) dan pendapatan asli daerah (X2) secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan sisanya 13,91% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

**Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah** Berdasarkan hasil penelitian diketahui dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah di Aceh dengan koefisien regresi variabel dana alokasi umum sebesar -0,298861 dan nilai signifikansi sebesar 0,9100. Hal ini berarti bahwa besarnya belanja daerah pemerintah Aceh tidak dipengaruhi oleh jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat sehingga ketergantungan pemerintah Aceh terhadap pemerintah pusat rendah, dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah** Berdasarkan hasil penelitian diketahui pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Aceh dengan koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah sebesar 5,153113 dan nilai signifikansi sebesar 0,0283. Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja daerah pemerintah Aceh, dan semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula belanja daerah di Aceh, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

**Hasil Analisis *Flypaper Effect*** Dapat dilihat pada tabel IV-4 koefisien dana alokasi umum sebesar -0,298861 lebih kecil dari koefisien pendapatan asli daerah sebesar 5,153113 dimana memiliki arti bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di Aceh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mulai dari tahun 2005 sampai 2020 tidak terjadi *flypaper effect* pada pemerintah Aceh. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Rokhaniyah & Nugroho (2011), dimana tidak terjadi *flypaper effect* pada daerah luar Jawa (perbedaan potensi daerah). Pengaruh yang ditimbulkan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dalam 16 tahun terakhir yang dimana pendapatan asli daerah lebih besar terhadap belanja daerah bila dibandingkan dengan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Karena dengan jumlah pendapatan asli daerah yang paling tinggi dalam pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut mampu untuk membiayai segala kegiatannya dalam menjalankan otonomi daerah atau dengan kata lain daerah tersebut bisa mandiri tanpa bergantung bantuan dana dari pusat. Tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi belanja daerah diukur dari besarnya perbandingan antara pendapatan asli daerah sebagai pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dengan dana alokasi umum sebagai pendapatan dari pihak lain yang mencerminkan kebutuhan fiskal suatu daerah.

Penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah tidak dipengaruhi oleh jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Aceh dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah sudah efisien, sehingga hipotesis ketiga diterima atau terbukti kebenarannya.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah pemerintah Aceh tidak dipengaruhi oleh jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat sehingga ketergantungan pemerintah Aceh terhadap pemerintah pusat rendah.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja daerah pemerintah Aceh, dan semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula belanja daerah di Aceh.
3. Dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Aceh.
4. Tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di Aceh.

**Saran**

1. Diharapkan pemerintah Aceh agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya agar dalam pembiayaan-pembiayaan pengeluaran belanja daerah tidak lagi bergantung kepada dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Sehingga tercipta kemandirian pemerintah Aceh dalam menjalankan sistem perekonomiannya secara efektif dan efisien.
2. Diharapkan pemerintah Aceh mampu memberikan pelayanan atau fasilitas publik yang lebih memadai yang dapat digunakan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan sumber daya yang lebih baik.

**REFERENSI**

Darwanto dan Yustikasari. 2012. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”, **Simposium Nasional Akuntansi**, Juli, Makasar.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. **Data Keuangan Daerah**. 2005-2019. DJPK. Kemenkeu.

Hidayat, Syarif. 2005. *Too Much Too Soon ; Local States Elite’s Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hirawan, Susiyati Bambang. 2007. **Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia,** Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetapdalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia, Jakarta. 24 Pebruari 2007.

Kuncoro, M. 2010. **Ekonomi Pembanguna** , Jakarta: Erlangga

Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.

Penthury, M. A. 2011. Flypaper Effects Anomaly Of West Papua Capital Public Expenditure, **Economic Journal Of Emerging Markets**, Vol. 3 No.3, 289-297

Priyo, Hari Adi. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan**, Vol.6, No.1: 1-19.

Sugiyono. 2014. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

Tresch, Richard. 2002. *“ Finance Public Anormative Theory* *”.* Department of Economic , Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.